

## Analisis Komunikasi Politik Kepala Desa Buttu Pamboang Dalam Menerapkan Sustainable Development Goals (SDG's) Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan

**Muhammad Sulthan<sup>1</sup>, Muhammad Yusri AR<sup>2</sup>, Septiawan Ardiputra<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat

Email : [septiawan.ardiputra@unsulbar.ac.id](mailto:septiawan.ardiputra@unsulbar.ac.id)

### Abstrak

SDG's Desa merupakan komitmen global dan termasuk dalam program kebijakan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan warga negara. Komunikasi merupakan suatu proses dalam penyampaian ide-ide, pesan, atau gagasan kepada partisipan komunikasi untuk saling mempersuasi demi terwujudnya kesepakatan. Ujung tombak dari keberlangsungan SDG's Desa berada di desa, dalam hal ini adalah seperti apa strategi komunikasi persuasif yang dijalankan oleh kepala desa, agar warganya dapat berpartisipasi dalam menyukseskan SDG's di desa. Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, namun lebih banyak terjadi pada negara negara berkembang, karena kondisi pembangunan yang masih belum stabil dan sustainable. Pada umumnya kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok minimal suatu negara. Sesungguhnya yang menjadi produk dari organisasi pemerintahan adalah pelayanan masyarakat (publik service). Pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi hak masyarakat, baik itu merupakan layanan civil maupun layanan publik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Kepala Desa Buttu Pamboang dalam menyosialisasikan SDGs desa di desanya memakai bermacam wujud komunikasi dalam mempersuasi kepada warganya supaya berpartisipasi dalam program SDGs desa. Strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam mewujudkan SDG's Desa terkait pengentaskan kemiskinan merupakan sebuah kerja keras dan kerja kontinyu karena mengubah mind set warga bukanlah pekerjaan yang ringan apalagi warga yang mempunyai tingkat Pendidikan yang rendah perlu kesabaran yang tinggi.

**Kata Kunci:** *SDG's, Pemerintahan Desa, Komunikasi Politik*

### Abstract

SDG's Desa is a global commitment and is included in the national policy program in an effort to improve the welfare of citizens. Communication is a process of conveying ideas, messages or ideas to communication participants to be mutually persuasive in order to realize an agreement. The spearhead of the sustainability of SDG's Village is in the village, in this case, what kind of persuasive communication strategy is implemented by the village head, so that the residents can participate in the success of SDG's in the village. Poverty is a problem faced by all countries, both developed and developing countries, but it is more common in developing countries, because development conditions are still not stable and sustainable. In general, poverty is measured by the level of income and minimum basic needs of a country. In fact, the product of government organizations is public service. These services are provided to fulfill people's rights, whether they are civil services or public services. This research uses a qualitative descriptive research type. The Head of Buttu Pamboang Village in socializing village SDGs in his village uses various forms of communication in persuading his residents to participate in the village SDG's program. The strategy that has been carried out by the village government in realizing SDG's Village related to poverty alleviation is hard work and continuous work because changing the mindset of residents is not easy work, especially residents who have a low level of education need a lot of patience.

**Keywords:** *SDG's, Village Government, Political Communication*

## PENDAHULUAN

Isu kemiskinan merupakan isu yang cukup menarik untuk dibahas sekalipun masih bersifat klasik. Masalah bagi bangsa setiap bangsa di dunia ini adalah kemiskinan, baik itu bangsa yang sudah maju maupun bangsa yang masih berkembang termasuk Indonesia. Penanganan kemiskinan bukan hanya masalah lokal, regional atau nasional akan tetapi sudah termasuk masalah Internasional. Namun dengan adanya Globalisasi interaksi antar bangsa-bangsa di muka bumi ini sudah sedemikian intens nya sehingga perubahan dunia dengan cepatnya. Isu-isu yang dibahas pun demikian beragam termasuk masalah yang berkaitan dengan kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia masih menjadi persoalan yang sulit untuk di tuntaskan tetapi ada upaya untuk mengurangi jumlah kemiskinan. Salah satu upaya dalam mengurangi kemiskinan dengan menerapkan program global yang direduksi masuk ke dalam program nasional adalah SDGs dan SDGs ini diterapkan di desa maka ditambahkan Namanya menjadi SDGs Desa.

Oleh karena itu SDG's desa di harapkan dapat mengatasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan kemiskinan di Indonesia. Terdapat beberapa tantangan yang besar dalam pelaksanaan SDGs Indonesia dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan, diantaranya ialah memastikan pelaksanaan prinsip inklusif dan no one left behind, yang mengintegrasikan semua program stakeholder dalam rencana aksi SDG's, membangun database yang komprehensif serta & inklusif serta sinergi antara prioritas-prioritas pemerintah dan non-pemerintah (Bambang PS Brodjonegoro).

SDG's Desa merupakan komitmen global dan termasuk dalam program kebijakan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan warga negara. Jika seseorang berkomunikasi dengan salah satu isi pesannya tentang kebijakan maka sudah termasuk komunikasi politik kemudian yang menyampaikan (komunikatornya) adalah seorang pejabat dalam pemerintahan (Kepala Desa) sudah jelas komunikasi politik (Sulthan, 2010). Secara teoritis dalam mengomunikasikan SDG's Desa kepada public termasuk dalam komunikasi politik terlebih lagi yang mengomunikasikan adalah pemerintah desa yang tidak lain merupakan penguasa dalam wilayah desa. Komunikasi merupakan suatu proses dalam penyampaian ide-ide, pesan, atau gagasan kepada partisipan komunikasi untuk saling mempersuasif demi terwujudnya kesepakatan. Ujung tombak dari keberlangsungan SDG's Desa berada di desa, dalam hal ini adalah seperti apa strategi komunikasi persuasif yang dijalankan oleh kepala desa, agar warganya dapat berpartisipasi dalam menyukseskan SDG's di desa. Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah seperti apa komunikasi politik Kepala Desa Buttu Pamboang dalam menerapkan SDGs Desa untuk mengentaskan kemiskinan di desanya.?

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Sustainabel Development Goals (SDG's) Desa*

SDGs Desa adalah pembangunan total atas desa. Seluruh aspek pembangunan yang digagas PBB sejak pendirian hingga kini diterapkan, seluruh warga desa harus menjadi pemanfaatnya, tidak ada yang terlewat. Dan, kemajuan tiada akan berhenti, melainkan berkelanjutan bagi generasi-generasi mendatang. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, layak air bersih dan sanitasi, berenergi bersih dan terbarukan, infrastruktur dan inovasi sesuai kebutuhan. Warganya sehat dan sejahtera, menerima pendidikan berkualitas, perempuan berpartisipasi, menumbuhkan ekonomi merata, konsumsi dan produksi sadar lingkungan. Tinggal di permukiman yang aman dan nyaman, tanggap perubahan iklim, peduli lingkungan laut dan darat, damai berkeadilan, bermitra membangun desa. Arah baru pembangunan langsung diimplementasikan ke 74.953 desa-desa di Nusantara mulai tahun 2021, sesuai Peraturan Menteri Desa PDTT No 13/2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Aparat pemerintah pusat, daerah, dan desa, juga pegiat desa dan kelompok masyarakat, riuh mendengungkan SDG's Desa. Berbagai webinar mengaitkannya dengan kepemimpinan, badan usaha milik desa (BUM-Des), ramah kepada perempuan, pendeknya terkait beragam aspek kehidupan desa.

Mulai dikumandangkan sejak 1945, pengetahuan manusia tentang pembangunan terus berkumulasi. Ini ditandai PBB melalui konferensi tingkat tinggi pembangunan sejak 1960-an sampai 2000-an, baik mengenai lingkungan, sosial, anak, kependudukan, bencana, maupun iklim. Kumulasi pengetahuan pembangunan itu dirumuskan PBB sebagai Sustainable Development Goals pada 2015. Inilah pembangunan

yang holistik, lengkap sampai pada pengukurannya secara detail. Karena itu, rumusan SDGs sangat luas, mencakup 17 tujuan global, yang terinci atas 169 indikator capaian. Bahkan, pada 2020, PBB menetapkan indikator capaiannya meningkat menjadi 247. Sebagai salah satu pengusul aktif, Indonesia mendudukkan SDGs sebagai arus utama segenap pembangunan, baik di pusat maupun daerah. Perpres No 59/2017 mene-tapkannya sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dengan arahan untuk membuat rencana aksi nasional, provinsi, dan kabupaten (halaman 102). Kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi membentuk pusat studi pembangunan berkelanjutan. Swasta mengarahkan corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung kegiatan-kegiatan dalam rencana aksi.

SDGs menandai perubahan global pembangunan, yang melepaskan diri dari ideologi-ideologi yang acap bertolak belakang. Manajemen pembangunan global kini diarahkan pada kesamaan tujuan akhir pembangunan. Ideologi kapitalisme dan sosialisasi sama-sama menghilangkan kemiskinan warga, meningkatkan kesehatan warga, hingga menjaga lingkungan hidup di sekitar permukiman. Persoalannya, pembangunan selama ini selalu berupa narasi akbar, hanya memperhitungkan peran negara atau antarnegara. Kalaupun diturunkan pembahasannya, hanya sampai kepada pelaku ekonomi nasional atau pemerintah daerah. Padahal, Desa berkontribusi 74% terhadap SDGs nasional, yang dalam Perpres No 59/2017 disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Penghitungannya, 91% wilayah pemerintahan berupa desa sehingga pengelolaannya akan memenuhi tujuan energi bersih, pertumbuhan ekonomi, produksi, dan konsumsi. Tujuan berikutnya ialah pemerataan wilayah, infrastruktur, permukiman, tanggap perubahan iklim, lingkungan darat, lingkungan laut, perdamaian, dan kemitraan pembangunan. Sementara itu, 188 juta warga desa merupakan 43% penduduk Indonesia sehingga pemenuhan kebutuhan mereka menyumbang bagi tujuan penghilangan kemiskinan dan kelaparan, akses kesehatan, air bersih, dan pendidikan, serta kesetaraan gender.

Namun, sumbangan desa yang sangat besar itu luput dari perhatian. Tanpa menekankan peran desa, SDGs Indonesia selalu menempati posisi terbawah di antara 116 negara. Pada 2016 posisinya sudah pada rangking 98, sedangkan pada 2020 tambah merosot menjadi rangking 101. Namun, selama ini metode partisipatoris yang menjadi andalan pendekatan pembangunan ini tidak mampu memutuskan sendiri substansi pembangunan. Keputusan tergantung pada hasil musyawarah sehingga ada kalanya kebutuhan objektif desa tertutupi oleh keputusan musyawarahnya. Pada titik inilah pelokalan SDGs untuk masuk ke desa menjadi penting. Kolaborasi antarpihak di desa diarahkan untuk memenuhi tujuan-tujuan SDGs. Strategi pelokalan SDGs global sampai ke SDGs Desa dilakukan dengan memasukkan SDGs Desa ke dalam kebijakan resmi pemerintah.

### ***Kemiskinan***

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, namun lebih banyak terjadi pada negara negara berkembang, karena kondisi pembangunan yang masih belum stabil dan sustainable. Pada umumnya kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok minimal suatu negara (Rianto M.Nur, 2010).

Menurut Lincoln Arsyad kemiskinan itu bersifat multi dimensional. Artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka emiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Arsyad L, 2004). Salah satu persoalan mendasar dalam kehidupan manusia adalah kemiskinan, kerana kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar alam kehidupan. Dan kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi oleh banyak negara.

Pola kemiskinan ada empat yaitu, pertama adalah persistent poverty yaitu kemiskinan yang telah ronis atau turun temurun. Pola kedua adalah cyclical poverty, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah Seasonal poverty, yaitu kemiskinan musiman seperti di jumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah accidental poverty, yaitu kemiskinan kerana terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat (Djojohadikusumo S, 2011). Kemiskinan merupakan

kondisi masyarakat yang tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam pemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan (Subandi, 2012).

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2005). Hak-hak dasar tersebut antara lain :

- Terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup
- Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan
- Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan hidup bermartabat. Hak-hak dasar tersebut tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.

Secara umum, pada periode September 2011–Maret 2022, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, dan Maret 2021. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013 dan Maret 2015 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan Maret 2021 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia (BPS RI).

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang. Dibandingkan September 2021, jumlah penduduk miskin menurun 0,34 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2021, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 1,38 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 tercatat sebesar 9,54 persen, menurun 0,17 persen poin terhadap September 2021 dan menurun 0,60 persen poin terhadap Maret 2021. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2021–Maret 2022, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 0,04 juta orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 0,30 juta orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 7,60 persen menjadi 7,50 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 12,53 persen menjadi 12,29 persen (BPS RI).

Penjelasan Teknis dan Sumber Data BPS RI :

- Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan.
- Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.
- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
- Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan.
- Garis Kemiskinan per rumah tangga dihitung dari garis kemiskinan per kapita dikalikan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin.
- Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
- Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan Maret 2022 adalah data Susenas Konsumsi dan Pengeluaran bulan Maret 2022.

### **Pemerintahan Desa**

Pemerintahan dapat kita artikan se kumpulan orang yang mengelola serta melaksanakan kepemimpinan & koordinasi pemerintahan dan juga pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja masing-masing. Pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut (Syafii) :

- Perintah yang berarti melakukan aktifitas menyuruh, dalam hal ini terdapat 2 pihak, yaitu: yang memerintah mempunyai wewenang dan yang diperintah mempunyai kepatuhan ataupun keharusan.
- Sesudah ditambahkan awalan “pe” berubah jadi pemerintah, yang ber arti suatu badan/organisasi yang melaksanakan kekuasaan memerintah.
- Sesudah ditambahkan lagi akhiran “an” maka berubah menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan/tindakan, hal/cara atau urusan dari badan/organisasi yang melakukan/melaksanakan memerintah tersebut diatas.

Pemerintahan secara umum merupakan segala urusan yang di lakukan oleh Negara/Organisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat nya & kepentingan Negaranya sendiri, jadi tidak di artikan hanya sebagai Pemerintah yang cuma menjalankan tugas eksekutif saja, namun termasuk tugas-tugas lainnya antarlain legislatif dan yudikatif. Pemdesa adalah suatu proses penyatupaduan usaha-usaha masy. desa setempat dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakatnya. UU No.6 2014 Pasal 23, di tegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemdesa. Pasal 1 ayat 3 di rumuskan bahwa: Pemdesa merupakan Kepala Desa / yang dapat disebut dengan nama lain & dibantu oleh perangkat Desa sebagai salahsatu unsur penyelenggara.

Perangkat desa merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang tedapat didesa serta mempunyai tugas dalam membantu seorang kepala desa dalam mejalankan tugas dan wewenang kepala desa tersebut dalam melaksanakan pemerintahan dari desa tersebut dan keperluan dari masyarakat di desa dimana tempat tugasnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa kewenangan dalam pengangkatan serta pemberhentian seorang bagian dari pemerintahan desa adalah wewenang dari seorang kepala desa, akan tetapi didalam melaksanakan wewenangnya itu tentunya seorang kepala desa tetap harus sesuai dengan peraturan yang telah diatur didalam undang-undang ataupun peraturan yang berlaku.

Sesungguhnya yang menjadi produk dari organisasi pemerintahan adalah pelayanan masyarakat (publik service). Pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi hak masyarakat, baik itu merupakan layanan civil maupun layanan publik (Ardiputra S, 2020). Perangkat desa merupakan bagian dari pemerintahan yang bertugas pada pelayanan publik yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat dimana tempat dia bertugas, seorang perangkat desa juga ikut dalam membantu tugas yang dijalankan oleh seorang kepala desa dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat, oleh sebab itu seluruh perangkat desa juga diwajibkan mempunyai sebuah komitmen, keahlian, keterampilan, perasaan dan perhatian yang tulus serta juga memerlukan sebuah rasa peduli yang tinggi oleh seorang perangkat desa guna melaksanakan tugasnya yaitu melayani masyarakat. Dan Hakekat dari pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat (Ardiputra S, 2020).

### **Komunikasi Politik**

Ilmuwan Komunikasi A. Muis menjelaskan bahwa istilah komunikasi politik menunjuk pada pesan sebagai obyek formalnya sehingga titik berat onsepnya terletak pada komunikasi dan bukan pada politik. Sedangkan McNair memaparkan bahwa komunikasi politik adalah komunikasi yang diupayakan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Kemudian Graber memandang bahwa komunikasi politik adalah proses pembelajaran, penerimaan, dan persetujuan atas kebiasaan atau aturan, struktur, dan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan politik. Mengenai komunikasi politik ini (political communication) Kantaprawira, memfokuskan pada kegunaannya, yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik asyarakat

dengan sektor kehidupan politik pemerintah. Dengan demikian segala pola pemikiran, ide atau upaya untuk mencapai pengaruh, hanya dengan komunikasi dapat tercapainya segala sesuatu yang diharapkan, karena pada hakikatnya segala pikiran atau ide dan kebijakan (policy) harus ada yang menyampaikan dan ada yang menerimanya, proses tersebut adalah proses komunikasi.

Dilihat dari tujuan politik, maka hakikat komunikasi politik adalah upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideology tertentu dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan, dengan kekuatan mana tujuan pemikiran politik dan ideology tersebut dapat diwujudkan. Lasswell, memandang orientasi komunikasi politik telah menjadikan dua hal sangat jelas: pertama, bahwa komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan; nilai-nilai dan tujuan itu sendiri dibentuk di dalam dan oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu bagian; dan kedua, bahwa komunikasi politik bertujuan menjangkau masa depan dan bersifat mengantisipasi serta berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu. Seperti yang pernah dikemukakan oleh banyak ahli, terutama Harold Lasswell dengan formula "Who says what, in which channel, to whom, with what effect", komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari sumber komunikasi kepada penerima, yang berlangsung bisa menggunakan saluran (medium) maupun secara bertatap muka. Umpan balik sebagai balikan atas pesan yang telah diterima oleh penerima dalam proses komunikasi tersebut sangat berguna untuk menilai bagaimana akibat yang terjadi dari proses komunikasi. Komponen-komponen komunikasi tersebut merupakan basis bagi terjadinya proses komunikasi politik dalam suatu masyarakat.

Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan yang terjadi pada saat enam fungsi lainnya di jalankan, yaitu sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, membuat peraturan, aplikasi peraturan dan adjudikasi peraturan. Hal senada juga yang disampaikan oleh Sulthan bahwa komunikasi politik adalah komunikasi antara partisipan komunikasi yang isi pesannya meliputi tentang eksekutif, yudikatif, legislative, dan partai politik. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inheren di dalam setiap fungsi system politik. Meriam Budiardjo (1982) memahami komunikasi politik sebagai salah satu fungsi partai politik, yaitu meyalurkan beragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa untuk di perjuangkan menjadi kebijakan politik.

Sedangkan menurut Maswadi Rauf, mengatakan bahwa komunikasi politik merupakan kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yaitu berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintah, dan aktivitas komunikasi dalam kedudukan sebagai pekatu kegiatan politik. Komunikasi politik di bagi dalam dua dimensi yaitu kegiatan politik, penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-politik kepada pihak lain. Kedua, kegiatan ilmiah, kegiatan politik dalam system politik. Menurut Susanto, komunikasi politik adalah komunikasi politik yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sehingga masalah yang di bahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengingatkan semua warganya melalui sanksi yang di tentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik.

## **METODE**

Jenis penelitian kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, gambar (foto) dan dokumen resmi lainnya (Sugiyono dalam Ardiputra 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

SDGs ataupun SDGs desa merupakan suatu kebijakan global yang direduksi masuk ke dalam program nasional yang diteruskan kepada pemerintah desa. Perihal ini berarti SDG's / SDG's Desa merupakan bagian dari komunikasi politik sebab definisi komunikasi politik merupakan kegiatan komunikasi kepada partisipan komunikasi yang isi pesannya tentang kebijakan, kekuasaan, keadilan, serta tentang partai politik tercantum pengurus partai dari tingkatan elite sampai anggota. Bersumber pada definisi komunikasi politik di atas sehingga SDGs desa itu merupakan komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah desa ataupun penguasa tingkatan dasar. Jadi sadar ataupun tidak sadar, terencana ataupun tidak terencana hingga kades Pamboang sudah melaksanakan komunikasi politik.

Kepala Desa Buttu Pamboang dalam menyosialisasikan SDG's Desa di desanya memakai bermacam wujud komunikasi dalam mempersuasi kepada warganya supaya berpartisipasi dalam program SDGs desa. Bagi Kaur perencanaan Desa Buttu Pamboang komunikasi politik yang digunakan meliputi jaringan komunikasi kelompok semacam kelompok- kelompok posyandu, paguyuban kelompok nelayan, sedangkan komunikasi organisasi yang digunakan di antaranya merupakan Karang Taruna. Sedangkan komunikasi antar individu dicoba secara accidental saja. Strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam mewujudkan SDG's Desa terkait pengentaskan kemiskinan merupakan sebuah kerja keras dan kerja kontinyu karena mengubah mind set warga bukanlah pekerja yang ringan apalagi warga yang mempunyai tingkat Pendidikan yang rendah perlu kesabaran yang tinggi. SDG's desa adalah salah satu upaya pemerintah untuk membangun pedesaan dalam mengentaskan kemiskinan di desa. Hal ini sejalan dengan UU No.32 2014 tentang otonomi desa yang diharapkan desa dapat meningkatkan perekonomiannya. Sehingga tingkat kemiskinan yang ada di desa dapat dikurangi.

Menurut Kepala Desa Buttu Pamboang kemiskinan di desa hanya dapat dikurangi untuk menghilangkan kemiskinan di desa sangat sulit bahkan mustahil. Karena jumlah penduduk terus bertambah yang berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi sehingga melahirkan generasi yang tidak mampu pula. Pendapat Kepala Desa Buttu Pamboang senada dengan pernyataan oleh Noam Chomsky ( 2006) bahwa paradigma pembangunan yang berkelanjutan tersebut mustahil untuk mampu menghapuskan kemiskinan pada tahun 2030. Sesuatu hal yang tidak mungkin mengukur kemajuan suatu negara "berkembang" dengan menggunakan standar yang sama pada negara "modern". SDG's pun terlalu mereduksi semua fenomena dan masalah hanya dalam satu narasi solusi: pembangunan.

Diperlukan kejelian, kecermatan seorang kepala desa untuk melakukan pertumbuhan ekonomi di desanya dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, Menurut Kepala Desa Buttu Pamboang "kami sudah melihat berusaha menggali potensi desa yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dalam pengembangan ekonomi warga agar bertambah penghasilan kemiskinan di desanya dapat dikurangi dengan memanfaatkan dana desa yang tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik saja tetapi pembangunan sumberdaya manusia juga sangat dibutuhkan.

Fenomena kemiskinan ini hal yang sudah berlangsung sejak lama di muka bumi ini khususnya Indonesia, sudah berbagai usaha yang telah dilakukan dalam menanggulangnya, tetapi sampai saat ini masih saja tak dapat diatasi. Maka salah satu program yang diterapkan sekarang ini adalah SDG's Desa. Desa Buttu Pamboang adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Sulawesi Barat, Indonesia yang memiliki perekonomian atau tingkat penghasilan dibawah rata-rata atau minimum. Pendidikan yang rendah dan putus sekolah yang tinggi menjadi salah satu faktor atas permasalahan kemiskinan di Desa Buttu Pamboang ini. Dibutuhkan upaya pembangunan berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan yang ada. Negara pun harus hadir atas permasalahan ini yaitu dengan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 UU No.13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin sebagai bentuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Di dalam ayat 1 dan 2 terdapat pernyataan bahwa penanganan fakir miskin bisa dilakukan dengan pengembangan potensi diri masyarakat itu sendiri.

Pengembangan potensi diri melalui keterampilan pun perlu diimbangi dengan pemerintah desa bersama pengelola unit-unit usaha di desa melakukan bentuk strategi partisipatori itu berupa pelatihan dibebberapa kegiatan usaha untuk dapat menambah ilmu serta dapat menggerakkan ekonomi warga.

SDGs desa bisa tercapai apabila seluruh pihak dapat berpartisipasi saling bahu membahu untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di desa dibutuhkan keterlibatan semua stakeholder. Kata Kepala Desa Buttu Pamboang “kami sudah menghubungi stakeholder yang ada di desa, dengan menggunakan pengaruh yang saya miliki dalam mempersuasif mereka agar ikut berpartisipasi aktif pada program SDGs desa ini. Membangun komunikasi hal yang sangat urgent pada program SDGs desa ini. Komunikasi yang dibangun merupakan titik awal dalam pencapaian tujuan yang dikelola dengan tepat. Komunikasi dibangun dengan baik merupakan suatu indikator terlaksananya pengembangan ekonomi desa.

Strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong terlaksananya pengembangan BUMDes untuk mewujudkan SDGs Desa tidak semata melihat potensi desa/sumber daya alamnya tetapi dengan adanya komunikasi, ketersediaan fasilitas/peralatan, ketersediaan sumber daya manusia, kelengkapan struktur birokrasi dan sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut yang digunakan untuk mendorong pengelolaan dan pengembangan BUMDes. Komunikasi yang dibangun di BUMDes merupakan titik awal dalam pencapaian peningkatan tujuan untuk sasaran pengembangan BUMDes melalui jenis usaha yang dikelola dengan tepat.

## **SIMPULAN**

Komunikasi politik menunjuk pada pesan sebagai obyek formalnya sehingga titik berat onsepnya terletak pada komunikasi dan bukan pada politik menurut A.Muis. Sedangkan Mc.Nair memaparkan bahwa komunikasi politik adalah komunikasi yang diupayakan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Kemudian Graber memandang bahwa komunikasi politik adalah proses pembelajaran, penerimaan, dan persetujuan atas kebiasaan atau aturan, struktur, dan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan politik. Sesungguhnya yang menjadi produk dari organisasi pemerintahan adalah pelayanan masyarakat (publik service). Pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi hak masyarakat, baik itu merupakan layanan civil maupun layanan publik. Kepala Desa Buttu Pamboang dalam menyosialisasikan SDGs desa di desanya memakai bermacam wujud komunikasi dalam mempersuasif kepada warganya supaya berpartisipasi dalam program SDGs desa. Bagi Kaur perencanaan Desa Buttu Pamboang komunikasi politik yang digunakan meliputi jaringan komunikasi kelompok semacam kelompok- kelompok posyandu, paguyuban kelompok nelayan, sedangkan komunikasi organisasi yang digunakan di antaranya merupakan Karang Taruna. Sedangkan komunikasi antar individu dicoba secara accidental saja. Strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam mewujudkan SDG’s Desa terkait pengentaskan kemiskinan merupakan sebuah kerja keras dan kerja kontinyu karena mengubah mind set warga bukanlah pekerja yang ringan apalagi warga yang mempunyai tingkat Pendidikan yang rendah perlu kesabaran yang tinggi. SDG’s desa adalah salah satu upaya pemerintah untuk membangun pedesaan dalam mengentaskan kemiskinan di desa. Hal ini sejalan dengan UU No.32 2014 tentang otonomi desa yang diharapkan desa dapat meningkatkan perekonomiannya. Sehingga tingkat kemiskinan yang ada di desa dapat dikurangi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adinugroho, W. C., Prasetyo, L. B., Kusmana, C., & Krisnawati, H. (2022). Tracking Afkar Jurnal Tiga Bulanan Cides, Kelestarian Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan, CIDES
- Alisjahbana Armida Salsiah, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep Target Dan Strategi Implementasi, (Bandung, Unpad Press, 2018), Hal. VI
- Althoff, Michael Rush, 1989, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta : PT Rajawali).
- Approaches Fifth Edition. Los Angeles: SAGE Publications, Inc.
- Ardiputra, M. A., Kementerian, R. K. I. I. B. P., & RI, H. D. H. A. M. (2021). Pola Efektif Pembinaan Hukum untuk Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan Hukum. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 15(1), 37–48. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.37-48>
- Ardiputra, S, & Prawira, M. R. (2020). Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Pos Cabang Pasangkayu 91571. Jurnal PubBis, 4(2), 136–146. <https://doi.org/10.35722/pubbis.v4i2.278>
- Ardiputra, S. (2020). Aspek Tangible Pada Pelayanan Jasa Pos Di Kantor Pos Cabang Pasangkayu 91571. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 6(2), 163–176. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jpap.v6i2.4294>



- Ardiputra, S. (2021). Manajemen Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik (I). Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Ardiputra, S. (2022). Sosialisasi dan Edukasi Manfaat Penanaman Bakau Di Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 283-289.
- Ardiputra, S. (2022). Sosialisasi UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan Edukasi Cerdas dan Bijak dalam Bermedia Sosial. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 707-718.
- Ardiputra, S., Prawira, M. R., Tasbir, M., Permata, S. U., Listiawati, N., & Qadrini, L. (2020). Pembagian Masker Dan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Masyarakat Desa Pallis Kecamatan Balanipa. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 395-400.
- Ardiputra, Septiawan, Abdullah, M. A., Qadrini, L., Nurlaela, N., Permata, S. U., & Suburia, S. (2021). Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19 Melalui Program KKN Mandiri Gelombang XV Tahun 2020 Universitas Sulawesi Barat. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 108–112.
- Ardiputra, Septiawan, Prawira, M. R., M. Tasbir, Permata, S. U., Listiawati, N., & Qadrini, L. (2020). Pembagian Masker Dan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Masyarakat Desa Pallis Kecamatan Balanipa. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1 No.3, 395–400. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v1i3.1095>
- Ardiputra, Septiawan. (2021). Manajemen Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik (I). Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=cyYow3kAAAAJ&authuser=1&citation\\_for\\_view=cyYow3kAAAAJ:mVmsd5A6BfQC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=cyYow3kAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=cyYow3kAAAAJ:mVmsd5A6BfQC)
- Ardiputra, Septiawan. (2022). Buku Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (I). CV. Feniks Muda Sejahtera. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=cyYow3kAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation\\_for\\_view=cyYow3kAAAAJ:TFP\\_iSt0sucC&gmla=AJsN-F4dhzPrQFmqwhhutsal7r617TQSEbG8srbhHeXCZHiyyOFT-XjHgBTROhMwCHX6cw01hwBbi8AnYIF-7rhZaRYOut1MLsP\\_Sk6ZEQe87AobgXT4YJ0&sciund=13033343769562545280&gmla=AJsN-F41e17PwmgOEwclaklcu12SXEqlrPYR8Qx0C7d2Kk5GRDXWd\\_GuV6X8ZCaURwHPqSqF04-H5JA9Jrbk2QcEzA-QO0bL8IPMdUCdiTRiP3VD7lhKmM&sciund=3748099264199476106](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=cyYow3kAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=cyYow3kAAAAJ:TFP_iSt0sucC&gmla=AJsN-F4dhzPrQFmqwhhutsal7r617TQSEbG8srbhHeXCZHiyyOFT-XjHgBTROhMwCHX6cw01hwBbi8AnYIF-7rhZaRYOut1MLsP_Sk6ZEQe87AobgXT4YJ0&sciund=13033343769562545280&gmla=AJsN-F41e17PwmgOEwclaklcu12SXEqlrPYR8Qx0C7d2Kk5GRDXWd_GuV6X8ZCaURwHPqSqF04-H5JA9Jrbk2QcEzA-QO0bL8IPMdUCdiTRiP3VD7lhKmM&sciund=3748099264199476106)
- Ardiputra, Septiawan. (2022). Buku Pengantar Ilmu Ekonomi (I). Yayasan Hamjah Diha (Anggota IKAPI). [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=cyYow3kAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation\\_for\\_view=cyYow3kAAAAJ:isC4tDSrTZIC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=cyYow3kAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=cyYow3kAAAAJ:isC4tDSrTZIC)
- Arfiansyah, Mufti Arief. —Dampak Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Tengah *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 1, no. c (2020): 91–106.
- Arikunto, Suharmis. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Artino, Adi, Bambang Juanda, and Sri Mulatsih. —Keterkaitan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lombok Utara. *Tataloka* 21, no. 3 (2019): 381.
- Budiardjo, Mirian. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka. Jakarta
- Bukhari, Eri. —Pengaruh Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Penduduk Desa. *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 2 (2021): 219–228
- Effendy, Onong Uchjana. (2007). *Ilmu Komunikasi (Teori dan Praktek)*. Bandung: PT.
- Effendy, Onong Uchjana. 2005. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang* 2011).
- Environmental Quality of Indonesia's New Capital City and its Surrounding Area.*  
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/BRSbrsInd-20220715100206\_rev.pdf
- Handayani, Desy Mediana. —Analisis Pengaruh Penggunaan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Kediri. *Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya* (2019)  
<http://digilib.iainkendari.ac.id/541/3/BAB%20II.pdf>  
<http://digilib.uinsby.ac.id/13374/36/Bab%202.pdf>  
<http://obor.or.id/SDGs-DESA-Percepatan-Pencapaian-Tujuan-Pembangunan-Nasional-Berkelanjutan>  
<http://repository.uinbanten.ac.id/3894/4/BAB%20II%20SKRIPSI%20AI.pdf>  
[http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1012/5/111801068\\_file%205.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1012/5/111801068_file%205.pdf)  
<http://repository.umko.ac.id/id/eprint/134/4/BAB%202%20NELA.pdf>  
<http://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2014/A.111.14.0144/A.111.14.0144-05-BAB-II-20190201060926.pdf>  
<https://eprints.umm.ac.id/37024/3/jiptumpp-gdl-rogoerwir-51214-3-babii.pdf>  
[https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/pada\\_hari\\_senin\\_21\\_November\\_2022\\_pada\\_pukul\\_25.37\\_WITA](https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/pada_hari_senin_21_November_2022_pada_pukul_25.37_WITA)

[https://publisher.yccm.or.id/index\\_hp/cishum/article/view/41](https://publisher.yccm.or.id/index_hp/cishum/article/view/41) /Vol. 1 No. 1 (2022): Citra Sosial Humaniora (CISHUM), Edisi Februari 2022)

<https://rancaekekwetan.desa.id/artikel/2022/8/26/sdgs-desadandanpenerapannya-dalam-rkp-desadandarpjn-desa#:~:text=SDGs%20Desa%20adalah%20upaya%20terpadu,Pembangunan%20Berkelanjutan%20di%20tingkat%20Desa.>

<https://setkab.go.id/paradigma-baru-komunikasi-pemerintah-di-era-digital/>

<https://sukawera.desa.id/lietarsi-buku-sdgs-desa>

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html#:~:text=Persentase%20penduduk%20miskin%20perkotaan%20pada,29%20persen%20pada%20Maret%202022.>

<https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>

Ikawati, and Sri Wahyuni. —Kondisi Kemiskinan Di Pedesaan Dan Perkotaan. || Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial 40, no. 2 (2016): 191–202.

In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 950, No. 1, p.

Internet:Ishartono dan Santoso Tri Raharjo.2016. Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan. Social Work Jurnal. 6(2): 154 -272. Jakarta:Media Pustaka, 2015.

Jaya, Askar. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Pengantar Falsafah Sains:Bogor, 2015.

Journal of Government and Politics (JGOP) ISSN:2686-3391 Vol. 4 No. 1 Juli 2022

Journal of Government and Politics (JGOP) Vol. 4 No. 1 Juli 2022 Hal. 1-15

Lincoln Arsyad, Ekonomi Pembangunan, (Yogyakarta: STIE YKPN,2004), h.237

M. Nur Rianto Al Arif, Teori Makro Ekonomi Islam, (Bandung: Alfabeta 2010).

Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 67

Medcom (2022), Retrieved from <https://www.medcom.id/ekonomi/sustainability/ZkeB8gqK-kemiskinanmasih-jadi-tantangan-penerapan-sdgs> (diakses pada 15 November 2022) Media Group.

Musafira, F., Qadrini, L., Fatimah, M. F., & Ardiputra, S. (2020). Edukasi Pembuatan Dan Penyempotan Desinfektan Pada Masyarakat Di Desa Suruang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(3), 416–421. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/1110>

NOAM CHOMSKY. ( 2006). HE ABUSE OF POWER AND THE ASSAULT ON DEMOCRACY; Library of Congress - Cataloging-in-publication-data November 2015, hal.8

Nugroho, Iwan & Dahuri, Rochmin. (2004). Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi. Pamboborang. Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(3).

Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di kabupaten/ kota di Jawa Tengah”,(Skripsi Fakultas Prawira, M. R., Ardiputra, S., & Hidayat, R. (2022). Analisis Dampak Wacana Publik Di Media Massa Dan Media Sosial Terhadap Kebijakan Publik (Sulawesi Barat). MANDAR: Social Science Journal, 1(1), 74-85.

Qadrini, L. (2018). Ensemble Fuzzy, K-Prototypes & Density Peaks Clustering Mixed) pada Pengelompokan Data Pelamar Bidikmisi Sejava-Timur Tahun 2016-2017.

Qadrini, L. (2020). Metode K-Means dan DBSCAN pada Pengelompokan Data Dasar Kompetensi Laboratorium ITS Tahun 2017. J Statistika: Jurnal Ilmiah Teori dan Aplikasi Statistika, 13(2), 5-11.

Qadrini, L. (2020a). Ensembel Fuzzy, Ensembel Rock Pada Pengelompokan Pelamar Bidikmisi Sejava Timur Tahun 2017. Jurnal MSA (Matematika Dan Statistika Serta Aplikasinya), 8(1), 46–50. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/msa/article/view/JMSA.VOL8N1046/pdf>

Qadrini, L. (2020b). Penyerapan Ion Logam Merkuri Menggunakan Arang Aktif Limbah Kulit Pisang Kepok (Musa paradisiaca Formatypica). KOVALEN: Jurnal Riset Kimia, 6(1), 39–44.

Qadrini, L. (2022). Handling Unbalanced Data With Smote Adaboost. Jurnal Mantik, 6(2), 2332-2336.

Qadrini, L. (2022). Penguatan Literasi Berinternet Sehat Dan Cerdas Kepada Masyarakat Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Menuju Desa Sehat Internet. Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(3), 3-1483.

Qadrini, L. (2022). Penyuluhan Manfaat Bakau kepada Masyarakat Pesisir Desa Panyampa. Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia, 2(2), 719-726.

Qadrini, L. (2022). W Workshop Tracer Studi SMK MA'ARIF NU 1 Ajibarang, Banyumas. Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(1), 302-306.

Qadrini, L. (2022). Workshop Tracer Studi SMK MA'ARIF NU 1 Ajibarang, Banyumas. Mejuajua: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat, 1(3), 1-5.

Qadrini, L., & Stat, M. (2022). Modul Praktikum Rancangan Percobaan. Feniks Muda Sejahtera.

- Qadrini, L., Ardiputra, S., & Seppewali, A. (2020). Bimbingan Teknis Olah Data Dengan SPSS 25 Untuk Para Pegawai Kantor BKAD Kabupaten Majene. *Dharmakarya*, 9(3), 184–187.
- Qadrini, L., Asrirawan, A., Mahmudah, N., Fahmuddin, M., & Amri, I. F. (2021). Forecasting Bank Indonesia Currency Inflow and Outflow Using ARIMA, Time Series Regression (TSR), ARIMAX, and NN Approaches in Lampung. *Jurnal Matematika, Statistika Dan Komputasi*, 17(2), 166–177.
- Qadrini, L., Hikmah, H., & Megasari, M. (2022). Oversampling, Undersampling, Smote SVM dan Random Forest pada Klasifikasi Penerima Bidikmisi Sejava Timur Tahun 2017. *Journal of Computer System and Informatics (JoSYC)*, 3(4), 386-391.
- Qadrini, L., Seppewali, A., & Aina, A. (2021). Decision Tree dan Adaboost pada Klasifikasi Penerima Program Bantuan Sosial. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), 1959–1966.
- Raharjo, Social Work Journal Vol: 6 No.2 hal 163. ISSN:2339 -0042
- Raya. || JSHP : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan 4, no. 1 (2020): 1–12. Remaja Rosdakarya.
- Ritonga, Andy, Hefrizal Handra, and Fery Andrianus. —Pengaruh Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Sumatera Barat. || Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif 16, no. 2 (2021): 277
- Ritonga, Hamonangan. (2003). Perhitungan Penduduk Miskin. Jakarta: Badan pusat Statistik.
- Salam, anisa nur. —Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Badan Umum Milik Desa (BUMDES). || Az Zarka' 10, no. 5 (2018): 370–396.
- Salimuddin, Studi Sosiologi dalam Pembangunan Pedesaan Analisis Manajemen Pesantren, Pustaka Soetomo. (2006). Strategi-strategi Pemberdayaan Masyarakat. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Sosial, dan Lingkungan. LP3ES: Jakarta.
- Subandi, Ekonomi Pembangunan, (Yogyakarta: Alfabeta 2012) hlm.78
- Sugiyono, P. (2015). Metode penelitian kombinasi (mixed methods). Bandung: Alfabeta, 28,
- Sugiyono. 2018. Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sulthan, M., & Ardiputra, S. (2021). Komunikasi Penyuluhan Pariwisata Menuju Desa Wisata
- Sulthan, M., & Ardiputra, S. (2021). Komunikasi Penyuluhan Pariwisata Menuju Desa Wisata
- Sulthan, M., & Ardiputra, S. (2021). Komunikasi Penyuluhan Pariwisata Menuju Desa Wisata Pamboborang. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3).
- Sulthan, M., Ardiputra, S., & AR, M. Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Layang-Layang Berlampu. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 1949-1954.
- Susanto, E. H. (2017). Media sosial sebagai pendukung jaringan komunikasi politik. *Jurnal Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Pengentasan Kemiskinan*, Ishartono & Santoso Tri Usman, Sunyoto. (2006). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pusataka Pelajar
- Whisnu Adhi Saputra, “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM,
- Wiryanto. 2004. Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta: Grasindo
- Yarlina Yacoub, “Pengaruh Tingkat Penagngguran terhadap Tingkat Kemiskinan